

1.02.000005

## Pembahasan Kebijakan Anggaran

IKU

LPPD

<b>Kode</b>	1.02.000005
<b>Produsen Data</b>	SEKRETARIAT DPRD
<b>Bidang Urusan</b>	SEKRETARIAT DPRD
<b>Sifat Data</b>	LPPD
<b>Satuan</b>	persen
<b>Tgl. Input Data</b>	21 August 2024
<b>Tgl. Diperbaharui</b>	18 May 2026

### DEFINISI & METODOLOGI

#### Kegiatan Statistik Penghasil Data

1. Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD 2. Dukungan pelaksanaan Kebijakan Anggaran

#### Konsep

Kebijakan Anggaran

#### Klasifikasi

(Tanpa Klasifikasi)

#### Definisi

Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah Dokumen yang memuat kebijakan bidang Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk Periode 1 (satu) Tahun. Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Di susun berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran tahunan dari RPJMD serta mempedomani Rencana Kerja Pemerintah dan Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang Pelaksanaan Teknisnya Berpedoman pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor. 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

#### Cara Interpretasi

Kebijakan anggaran Kabupaten Nunukan mengacu pada Peraturan Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. Program dan kegiatan prioritas dalam dokumen RKPD 2024 menjadi acuan bagi setiap SKPD dalam menyusun rencana kerja (RENJA).

#### Metode Pengumpulan

Capaian Dukungan Pelaksanaan Kebijakan Anggaran Sesuai dengan Tugas dan Fungsi DPRD, realisasi dukungan pelaksanaan Kebijakan Anggaran sesuai dengan tugas dan fungsi DPRD)

#### Ukuran / Rumus

persentase

### # Series Column

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
-----------	------	------	------	------	------	------	------

